BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh sesorang atau sekelompok orang yang kegiatannya adalah melakukan produkti dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Terdapat beberapa jenis badan usaha yang diklasifikasikan berdasarkan kegiatan utama yang dijalankannya. Jenis badan usaha tersebut adalah perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri.

1. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa.

   Contoh : Kantor Akuntan, Salon, Bengkel, dan lain-lain.
2. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi.

   Contoh : Toserba, Dealer, Toko Kelontongan dan lain-lain.
3. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut.

Contoh : Pabrik sepatu, pabrik roti, garment dan lain-lain.

4.1.1 Kegiatan Perusahaan

Secara garis besar kegiatan usaha perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba. Tetapi disamping laba, perusahan juga harus menjaga agar tetap solvabel, artinya selalu tersedia uang tunai agar perusahaan dapat memenuhikewajibankewajiban pembayarannya. Kegiatan-kegiatan perusahaan tersebutadalah :

1. Pemilik menyetorkan modal ke dalam perusahaan.
2. Kreditur memberi pinjaman kepada perusahaan.
3. Perusahaan mengolah uang atau modal menjadi aktiva produktif.
4. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa.
5. Penjual menjual barang atau jasa kepada pelanggan.
6. Perusahaan membayar kembali pinjaman bila perusahaan mempunyai
1. kewajiban pembayaran atas pinjaman yang dilakukan.
7. Perusahaan membagi laba kepada pemilik.

Adapun kegiatan perusahaan bila berdasarkan jenis perusahaannya adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Jasa

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan jasa meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pembelian

Dalam sebuah perusahaan jasa kegiatan pembelian meliputi pembelian aktiva produktif seperti pembelian bangunan, tanah, dan perlengkapan untuk disewakan, serta aktiva produktif lainnya alam menunjang kegiatan usahanya.

b. Pengeluaran uang atau pembayaran

Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman bila perusahaan memiliki kewajiban pembayaran pinjaman.

c. Penjualan

Penjualan yang diberikan adalah penjualan atas jasa. Penjualan jasaini dapat berupa penyewaan gedung, penyewaan tanah, penyewaanperlengkapan dan jasa lainnya seperti jasa pemotongan rambut dan lain sebagainya.

d. Penerimaan uang

Penjualan atas jasa akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

2. Perusahaan dagang

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan dagang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pembelian

Dalam sebuah perusahaan dagang kegiatan pembelian meliputi pembelian aktiva produktif, pembelian barang dagang dan jasa lain dalam rangka kegiatan usahanya.

b. Pengeluaran uang atau pembayaran

Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik.

c. Penjualan

Penjualan dapat dilakukan secara kredit ataupun tunai. Penjualan secara kredit menimbulkan adanya piutang dagang. Pada saat penjualan, terkadang terdapat barang yang rusak sehingga perusahaan harus menerima pengembalian barang atau memberi potongan harga dan menyebabkan perusahaan mengalamikerugaian atas pengembalian tersebut.

d. Penerimaan uang

Penjualan atas barang akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

3. Perusahaan Industri atau Manufaktur

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan industri sama seperti siklus kegiatan perusahaan dagang hanya berbeda pada saat pembelian dan pengolahan

bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan perusahaan manufaktur tersebut meliputi sebagai berikut :

a. Pembelian

   Dalam sebuah perusahaan industri kegiatan pembelian meliputi pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong dan jasa lain dalam rangka kegiatan usahanya seperti buruh langsung.

b. Kegiatan Produksi

   Kegiatan produksi yaitu proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi kemudian mengolah barang setengah jadi tersebut menjadi barang jadi.

c. Pengeluaran uang atau pembayaran

   Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik.

d. Penjualan

   Penjualan dapat dilakukan secara kredit ataupun tunai. Penjualan secara kredit menimbulkan adanya piutang dagang. Pada saat penjualan, terkadang terdapat barang yang rusak sehinggaperusahaan harus menerima pengembalian barang atau memberi potongan harga dan menyebabkan perusahaan mengalamikerugaian atas pengembalian tersebut.

e. Penerimaan uang

Penjualan atas barang akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

4.1.2 Wilayah Penyebaran Perusahaan (Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying)

Berdasarkan cakupan wilayah dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying , wajib pajak badan (perusahaan) meliputi wilayah :

1. Kecamatan Cidadap
2. Kecamatan Coblong
3. Kecamatan Bandung Wetan
4. Kecamatan Sumur Bandung
5. Kecamatan Cibeunying Kaler
6. Kecamatan cibeunying Kidul

4.2 Karakteristik Responden

Jumlah keseluruhan kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 100 eksemplar. Jumlah yang kembali dan diolah sebanyak 100 eksemplar. Penyebaran kuesioner penelitian ini ditunjukan kepada pemilik perusahaan, ataupun bagian keuangan perusahaan (wajib pajak badan), dan dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada masing-masing perusahaan setiap wajib pajak badan untuk dijawab/ diisi. Dengan adanya keterbatasan penelitian berkaitan dengan peraturan kerahasiaan data wajib pajak, berikut disajikan profil responden berdasarkan jenis usaha :

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Penelitian Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah responden	%
Dagang	67	67 %
Jasa	33	33 %
Jumlah	100	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis usaha tertentu. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang jenis perusahaannya dagang berjumlah 67 responden atau sebesar 67 %, responden yang jenis perusahaannya jasa berjumlah 33 responden atau sebesar 33 %, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang. Hal ini disebabkan responden yang jenis perusahaannya dagang lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian kuesioner pada perusahaan di wilayah KPP Pratama Bandung Cibeunying.

4.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif data hasil penelitian digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden.

Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden di adopsi dari buku Metode Penelitian Bisnis karangan Sugiyono (2009;135) yaitu berdasarkan persentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai beriku :

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{Skor\ aktual}{Skor\ ideal} \times 100\%$$

Sumber : Sugiyono (2009:135)

Keterangan :

Skor aktual = jumlah skor jawaban responden

Skor ideal = jumlah skor maksimum (jumlah responden x jumlah pernyataan x 5)

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (5/5 =100%) dan skor minimum (1/5 = 20%). Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Kriteria Pengklasifikasian Presentase Skor Tanggapan Responden

No.	% Skor	Kriteria
1	20.00% – 36.00%	Sangat Tidak Baikk/Sangat Rendah
2	36.01% – 52.00%	Tidak Baik/Rendah
3	52.01% – 68.00%	Cukup Baik/Sedang
4	68.01% – 84.00%	Baik/Tinggi
5	84.01% – 100%	Sangat Baik/Sangat Tinggi

4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Penggelapan Pajak

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pada penelitian ini Penggelapan Pajak diukurmenggunakan 5 indikator dan dioperionalisasikan

dengan menggunakan 9 pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang Penggelapan Pajak pada KPP Pratam Cibeunying maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir pertanyaan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Rekapitulasi Responden pada Variabel Penggelapan Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
Tidak menyampaikan SPT	665	1000	66,5	Cukup baik
Menyampaikan SPT dengan tidak benar	333	1000	33,3	Sangat tidak baik
Tidak mendaftarkan diri/ menyalahgunakan NPWP/ pengukuhan PKP	271	1000	21	Sangat tidak baik
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong	271	1000	21	Sangat tidak baik
Berusaha menyuap fiskus	394	500	78,8	Baik
Total	1934	4500	42,97	Tidak baik

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persentase total skor tanggapan responden pada variabel Penggelapan Pajak sebesar 42,97 % berada diantara interval 36-52. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggelapan Pajak pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I khususnya KPP Pratama Cibeunying secara umum belum baik. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 9 x 100 = 4500
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 9 x 100 = 900

- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5

  = (4500 - 900) : 5

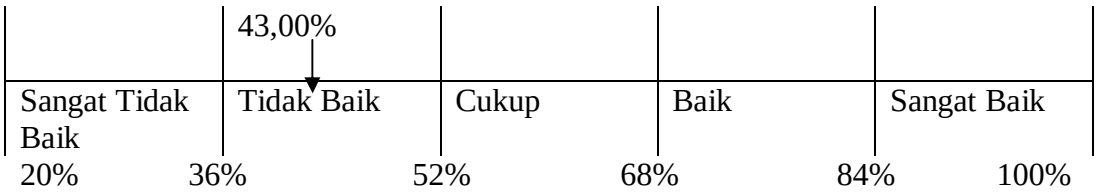
  = 720

- Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100%

  = (1934 : 4500) x 100%

  = 43.0%

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.5 di atas di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1
Garis Kontinum Penggelapan Pajak

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 1 sampai dengan 9 adalah 4500. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 1934 atau 43.0% dari skor ideal yaitu 4500. Dengan demikian Penggelapan Pajak yang ada pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I berada pada kategori tidak baik.

Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing indikator pada setiap butir pertanyaan akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Tidak menyampaikan SPT

Ketidaktepatan waktu menyampaikan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak badan di KPP Pratama Cibeunying diukur menggunakan 2 butir pertanyaan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada indikator tidak menyampaikan SPT :

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Tidak menyampaikan SPT

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
1	Wajib Pajak Badan berstatus PKP menyampaikan SPT Masa setelah tanggal 20 setiap bulannya	4	2	19	69	6	100	229	500
		4.0	2.0	19.0	69.0	6.0	100.0	45.8	
2	Wajib Pajak Badan berstatus PKP melakukan keterlambatan penyampaian SPT Masa dan dikenakan denda	75	10	3	0	12	100	436	500
		75.0	10.0	3.0	0.0	12.0	100.0	87.2	
Jumlah Skor Total								665	
Persentase Skor Total								66.5%	

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Tidak menyampaikan SPT. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Tidak menyampaikan SPT adalah 665. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 2 x 100 = 1000
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 2 x 100 = 200
- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5

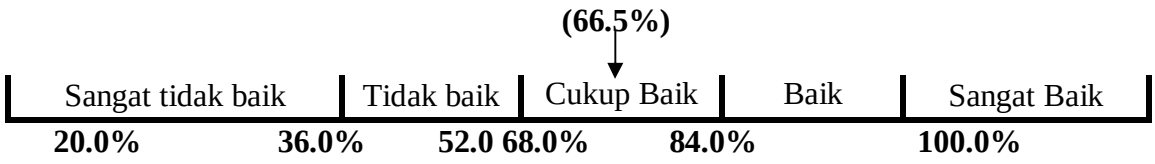
  = (1000 - 200) : 5

= 160

- Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100%

  = (665 : 1000) x 100%

  = 66.5%



Gambar 4.2
Garis Kontinum Tidak menyampaikan SPT

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 1 sampai dengan 2 adalah 1000. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 665 atau 66.5% dari skor ideal yaitu 1000. Dengan demikian Tidak menyampaikan SPT berada pada kategori cukup baik.

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden berdasarkan pernyataan wajib pajak badan berstatus PKP menyampaikan SPT masa setelah tanggal 20 setiap bulannya yaitu sebesar 45,8 % dikategorikan tidak setuju, karena 2 responden menjawab setuju menyampaikan SPT Masa setelah tanggal 20, 4 responden menjawab sangat setuju, 19 responden menjawab sukup setuju dan 6 responden menjawab sangat tidak setuju.

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab tidak setuju dengan menyampaikan SPT Masa sebelum tanggal 20.

Dan berdasarkan pernyataan Wajib Pajak Badan berstatus PKP melakukan keterlambatan penyampaian SPT Masa dan dikenakan denda, persentase skor

tanggapan responden yaitu sebesar 87,2 % dikategorikan sangat setuju. Karena 10 responden menjawab setuju, 3 responden menjawab cukup setuju dan 12 responden menjawab sangat tidak setuju.

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlambatan menyampaikan SPT Masa dan dikenakan denda merupakan tindakan yang sangat baik.

b. Menyampaikan SPT dengan tidak benar

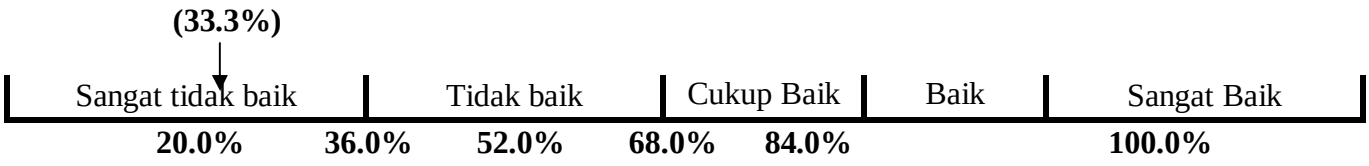
Penyampaian SPT dengan tidak benar pada KPP Pratama Cibeunying menggunakan 2 butir pertanyaan. Berikut distribusi pertanyaan pada indikator menyampaikan SPT dengan tidak benar.

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Menyampaikan SPT dengan tidak benar

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
3	Wajib Pajak Badan Berstatus PKP pada saat menyampaikan SPT Masa tidak melengkapi kelengkapan yang harus dilampirkan	4	4	2	34	56	100	166	500
		4.0	4.0	2.0	34.0	56.0	100.0	33.2	
4	Tindakan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP dengan tidak menandatangani SPT Masa yang akan dilaporkan	4	5	1	34	56	100	167	500
		4.0	5.0	1.0	34.0	56.0	100.0	33.4	
Jumlah Skor Total								333	
Persentase Skor Total								33.3%	

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Menyampaikan SPT dengan tidak benar. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Menyampaikan SPT dengan tidak benar adalah 333. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 2 x 100 = 1000
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 2 x 100 = 200
- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5
  = (1000 - 200) : 5
  = 160
- Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100%
  = (333 : 1000) x 100%
  = 33.3%



Gambar 4.3
Garis Kontinum Menyampaikan SPT dengan tidak benar

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 3 sampai dengan 4 adalah 1000. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 333 atau 33.3% dari skor ideal yaitu 1000. Dengan demikian Menyampaikan SPT dengan tidak benar berada pada kategori sangat tidak baik.

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden berdasarkan pernyataan wajib pajak badan berstatus PKP menyampaikan SPT masa tidak melengkapi kelengkapan yang harus dilampirkan yaitu sebesar 33,2 % dikategorikan sangat tidak setuju, karena 34 responden menjawab tidak setuju, 2 responden menjawab cukup setuju, 4 responden menjawab setuju dan 4 responden menjawab sangat setuju.

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat tidak setuju jika wajib pajak badan menyampaikan SPT Masa tidak melengkapi kelengkapan yang harus dilampirkan.

Dan berdasarkan pernyataan tindakan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP dengan tidak menandatangani SPT Masa yang akan dilaporkan, persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 33,4 % dikategorikan sangat tidak setuju. Karena 34 responden menjawab tidak setuju, 1 responden menjawab cukup setuju, 5 responden menjawab setuju dan 4 responden menjawab sangat setuju .

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak tidak menandatangani SPT masa yang akan dilaporkan.

c. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP

Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP pada KPP pratama Cibeunying diukur menggunakan 2 butir pertanyaan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada indikator tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP.

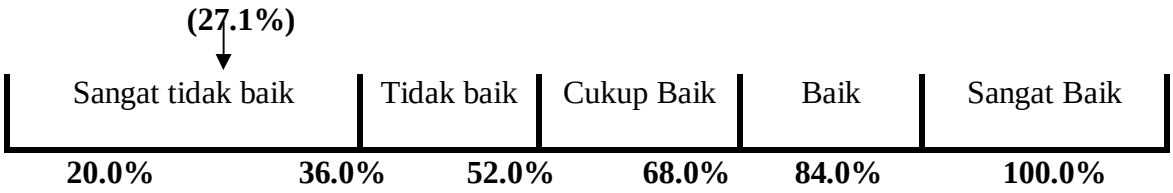
Tabel 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
5	Pengusaha tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak	0	3	7	10	80	100	133	500
		0.0	3.0	7.0	10.0	80.0	100.0	26.6	
6	Wajib Pajak Badan Berstatus PKP melakukan penyalahgunaan NPWP pada	0	4	8	10	78	100	138	500
		0.0	4.0	8.0	10.0	78.0	100.0	27.6	

	saat-saat tertentu merupakan tindakan yang lumrah								
Jumlah Skor Total									271
Persentase Skor Total									27.1%

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP adalah 271. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 2 x 100 = 1000
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 2 x 100 = 200
- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5
  = (1000 - 200) : 5
  = 160
- Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100%
  = (271 : 1000) x 100%
  = 27.1%



Gambar 4.4
Garis Kontinum Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 5 sampai dengan 6 adalah 1000. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 271 atau 27.1% dari skor ideal yaitu 1000. Dengan demikian Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP berada pada kategori sangat tidak baik.

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden berdasarkan pernyataan pengusaha tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak yaitu sebesar 26,6 % dikategorikan sangat tidak setuju, karena 10 responden menjawab tidak setuju dan 7 responden menjawab cukup setuju, 3 responden menjawab setuju.

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat tidak setuju jika pengusaha tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak.

Dan berdasarkan pernyataan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP melakukan penyalahgunaan NPWP pada saat-saat tertentu merupakan tindakan yang lumrah, persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 27,6 % dikategorikan sangat setuju. Karena 10 responden menjawab tidak setuju, 8 responden menjawab cukup setuju dan 4 responden menjawab setuju.

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak Badan Berstatus PKP melakukan penyalahgunaan NPWP pada saat-saat tertentu merupakan tindakan yang lumrah merupakan tindakan yang sangat tidak baik.

d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut

Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pada KPP Pratama Cibeunying diukur menggunakan 2 butir pertanyaan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap indikator tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
7	Tindakan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut merupakan tindakan yang wajar	0	1	1	20	78	100	125	500
		0.0	1.0	1.0	20.0	78.0	100.0	25.0	
8	Tindakan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP mengurangi penyetoran pajak yang telah dipungut merupakan tindakan yang maklum	5	0	7	12	76	100	146	500
		5.0	0.0	7.0	12.0	76.0	100.0	29.2	
Jumlah Skor Total								271	
Persentase Skor Total								27.1%	

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong adalah 271. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 2 x 100 = 1000
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 2 x 100 = 200
- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5

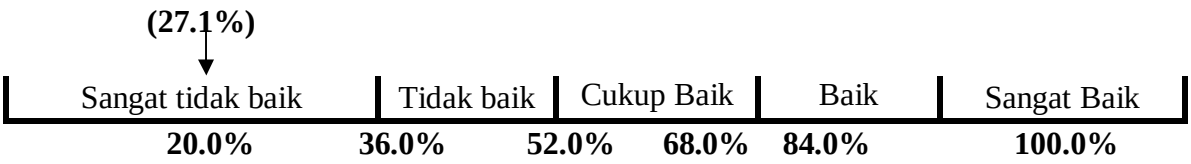
= (1000 - 200) : 5

= 160

- Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100%

= (271 : 1000) x 100%

= 27.1%



Gambar 4.5
Garis Kontinum Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 7 sampai dengan 8 adalah 1000. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 271 atau 27.1% dari skor ideal yaitu 1000. Dengan demikian Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong berada pada kategori sangat tidak baik.

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden berdasarkan pernyataan tindakan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut merupakan tindakan yang wajar yaitu sebesar 25,0 % dikategorikan sangat tidak setuju, karena 20 responden menjawab tidak setuju, 1 responden menjawab cukup setuju dan 1 responden menjawab setuju.

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat tidak setuju dengan tindakan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut merupakan tindakan yang wajar.

Dan berdasarkan pernyataan tindakan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP mengurangi penyetoran pajak yang telah dipungut merupakan tindakan yang maklum, persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 29,2 % dikategorikan sangat setuju. Karena 12 responden menjawab tidak setuju, 7 responden menjawab cukup setuju dan 5 responden menjawab sangat setuju.

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP mengurangi penyetoran pajak yang telah dipungut merupakan tindakan yang maklum adalah tindakan yang sangat tidak baik.

e. Berusaha menyuap fiskus

Upaya menyuap fiskus pada KPP Pratama Cibeunying diukur menggunakan 1 butir pertanyaan pada indikator berusaha menuap fiskus. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap indikator berusaha menyuap fiskus.

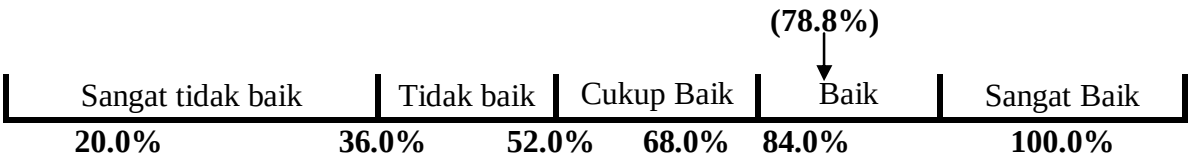
Tabel 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Berusaha menyuap fiskus

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
9	Melakukan tindakan pemberian hadiah dan semacamnya kepada aparat pajak merupakan tindakan tercela	68	0	6	10	16	100	394	500
		68.0	0.0	6.0	10.0	16.0	100.0	78.8	
Jumlah Skor Total								394	
Persentase Skor Total								78.8%	

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Berusaha menyuap fiskus. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Berusaha menyuap fiskus adalah 394. Jumlah

skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 1 x 100 = 500
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 1 x 100 = 100
- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5
  = (500 - 100) : 5
  = 80
- Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100%
  = (394 : 500) x 100%
  = 78.8%



Gambar 4.6
Garis Kontinum Berusaha menyuap fiskus

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 9 adalah 500. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 394 atau 78.8% dari skor ideal yaitu 500. Dengan demikian Berusaha menyuap fiskus berada pada kategori baik.

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden berdasarkan pernyataan melakukan tindakan pemberian hadiah dan semacamnya kepada aparat pajak merupakan tindakan tercela yaitu sebesar 78,8 % dikategorikan setuju, karena 16 responden menjawab sangat tidak setuju, 10 responden menjawab tidak

setuju, 6 responden menjawab cukup setuju dan 68 responden menjawab sangat setuju.

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa melakukan tindakan pemberian hadiah dan semacamnya kepada aparat pajak merupakan tindakan tercela merupakan tindakan yang sangat baik.

4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah Cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Pada penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalisasikan dengan menggunakan 4 pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang Penghindaran Pajak pada KPP Pratam Cibeunying maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir pertanyaan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

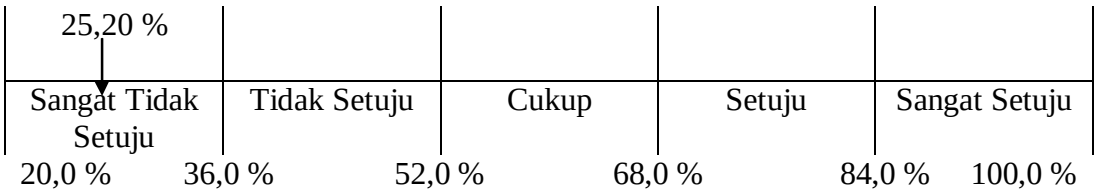
Tabel 4.9
Rekapitulasi Responden pada Variabel Penghindaran Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
Menahan diri	258	1000	25,8	Sangat tidak baik
Pindah lokasi	124	500	24,8	Sangat tidak baik
Penghindaran secara yuridis	122	500	24,4	Sangat tidak baik
Total	504	2000	25,2	Sangat tidak baik

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Penghindaran Pajak adalah 504. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 4 x 100 = 2000
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 4 x 100 = 400
- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5
  = (2000 - 400) : 5
  = 320
- Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100%
  = (504 : 2000) x 100%
  = 25.2%

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.5 di atas di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.7
Garis Kontinum Penghindaran Pajak

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 10 sampai dengan 13 adalah 2000. Dari perhitungan dalam

tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 504 atau 25.2% dari skor ideal yaitu 2000. Dengan demikian Penghindaran Pajak berada pada kategori sangat tidak baik.

Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing indikator pada setiap butir pertanyaan akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Menahan Diri

Menahan diri yang dilakukan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Cibeunying diukur menggunakan 2 butir pertanyaan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap indikator menahan diri :

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Menahan Diri

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
10	Ada pihak yang menawarkan akan meminimkan jumlah pajak bayar saudara	0	1	13	9	77	100	138	500
		0.0	1.0	13.0	9.0	77.0	100.0	27.6	
11	Pengusaha yang berdiam diri tidak melaporkan penghasilan usahanya	0	1	2	13	84	100	120	500
		0.0	1.0	2.0	13.0	84.0	100.0	24.0	
Jumlah Skor Total								258	
Persentase Skor Total								25.8%	

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Menahan Diri. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Menahan Diri adalah 258. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 2 x 100 = 1000
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 2 x 100 = 200

- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5

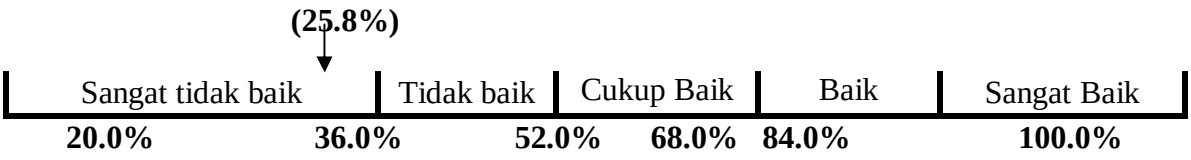
  = (1000 - 200) : 5

  = 160

- Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100%

  = (258 : 1000) x 100%

  = 25.8%



Gambar 4.8
Garis Kontinum Menahan Diri

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 10 sampai dengan 11 adalah 1000. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 258 atau 25.8% dari skor ideal yaitu 1000. Dengan demikian Menahan Diri berada pada kategori sangat tidak baik.

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden berdasarkan pernyataan ada pihak yang menawarkan akan meminimkan jumlah pajak bayar saudara yaitu sebesar 27,6 % dikategorikan sangat tidak setuju, karena 77 responden menjawab sangat tidak setuju dan 9 responden menjawab tidak setuju, 13 responden enjawab cukup setuju.

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat tidak setuju dengan tindakan ada pihak yang menawarkan akan meminimkan jumlah pajak bayar wajib pajak .

Dan berdasarkan pernyataan pengusaha yang berdiam diri tidak melaporkan penghasilan usahanya, persentase skor tanggapan responden yaitu sebesar 24,0 % dikategorikan sangat tidak setuju. Karena 84 responden menjawab sangat tidak setuju, 13 responden menjawab tidak setuju, 2 responden menjawab cukup setuju dan 1 responden menjawab setuju .

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa pengusaha yang berdiam diri tidak melaporkan penghasilan usahanya sangat tidak baik.

b. Pindah lokasi

Pindah lokasi yang dilakukan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Cibeunying diukur menggunakan 1 butir pertanyaan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap indikator pindah lokasi :

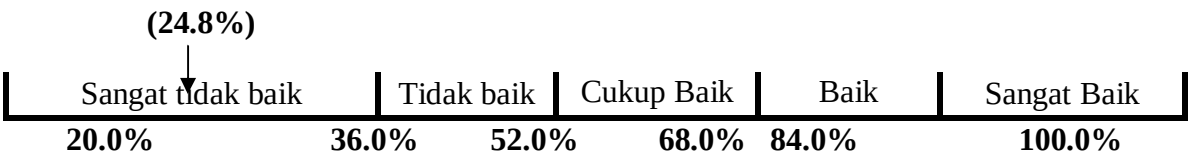
Tabel 4.11
Tanggapan Responden Mengenai Pindah Lokasi

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
12	Tindakan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP dengan pindah tempat pada saat akan dilakukan pemeriksaan merupakan hal yang wajar	0	1	1	19	79	100	124	500
		0.0	1.0	1.0	19.0	79.0	100.0	24.8	
Jumlah Skor Total								124	
Persentase Skor Total								24.8%	

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Pindah Lokasi. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Pindah Lokasi adalah 124. Jumlah skor tersebut

dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 1 x 100 = 500
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 1 x 100 = 100
- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5
  = (500 - 100) : 5
  = 80
- Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100%
  = (124 : 500) x 100%
  = 24.8%



Gambar 4.9
Garis Kontinum Pindah Lokasi

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 12 adalah 500. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 124 atau 24.8% dari skor ideal yaitu 500. Dengan demikian Pindah Lokasi berada pada kategori sangat tidak baik.

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden berdasarkan pernyataan tindakan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP dengan pindah tempat pada saat akan dilakukan pemeriksaan merupakan hal yang wajar yaitu sebesar

24,8 % dikategorikan sangat tidak setuju, karena 79 responden menjawab sangat tidak setuju, 19 responden menjawab tidak setuju, 1 responden menjawab cukup setuju dan 1 responden menjawab setuju.

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan Wajib Pajak Badan Berstatus PKP dengan pindah tempat pada saat akan dilakukan pemeriksaan merupakan hal yang wajar merupakan tindakan yang sangat tidak baik.

c. Penghindaran pajak secara Yuridis

Penghindaran secara yuridis yang dilakukan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Cibeunying diukur menggunakan 1 butir pertanyaan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap penghindaran secara yuridis :

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Mengenai Penghindaran Pajak Secara Yuridis

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor Total	Skor Ideal
13	Pengusaha yang berdiam diri tanpa melapor ketika proses pengiriman barang ke daerah/ negara lain	0	1	4	11	84	100	122	500
		0.0	1.0	4.0	11.0	84.0	100.0	24.4	
Jumlah Skor Total								122	
Persentase Skor Total								24.4%	

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Penghindaran Pajak Secara Yuridis. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Penghindaran Pajak Secara Yuridis adalah 122. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 1 x 100 = 500

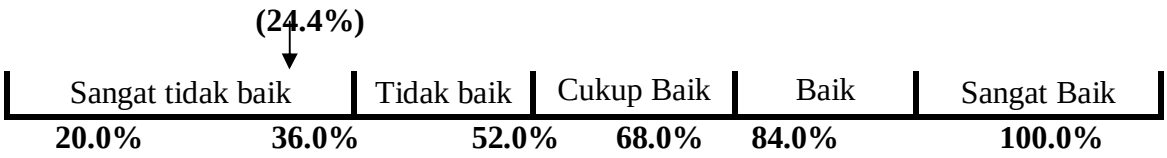
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 1 x 100 = 100
- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5

  = (500 - 100) : 5

  = 80
- Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100%

  = (122 : 500) x 100%

  = 24.4%



Gambar 4.10
Garis Kontinum Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 13 adalah 500. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 122 atau 24.4% dari skor ideal yaitu 500. Dengan demikian Penghindaran Pajak Secara Yuridis berada pada kategori sangat tidak baik.

Bila dilihat dari persentase skor tanggapan responden berdasarkan pernyataan Pengusaha yang berdiam diri tanpa melapor ketika proses pengiriman barang ke daerah/ negara lain yaitu sebesar 24,4 % dikategorikan sangat tidak setuju, karena 84 responden menjawab sangat tidak setuju, 11 responden menjawab tidak setuju, 4 responden menjawab cukup setuju dan 1 responden menjawab setuju.

Maka mayoritas tanggapan responden menjawab sangat tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan pengusaha yang berdiam diri tanpa melapor

ketika proses pengiriman barang ke daerah/ negara lain merupakan hal yang wajar merupakan tindakan yang sangat tidak baik.

4.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

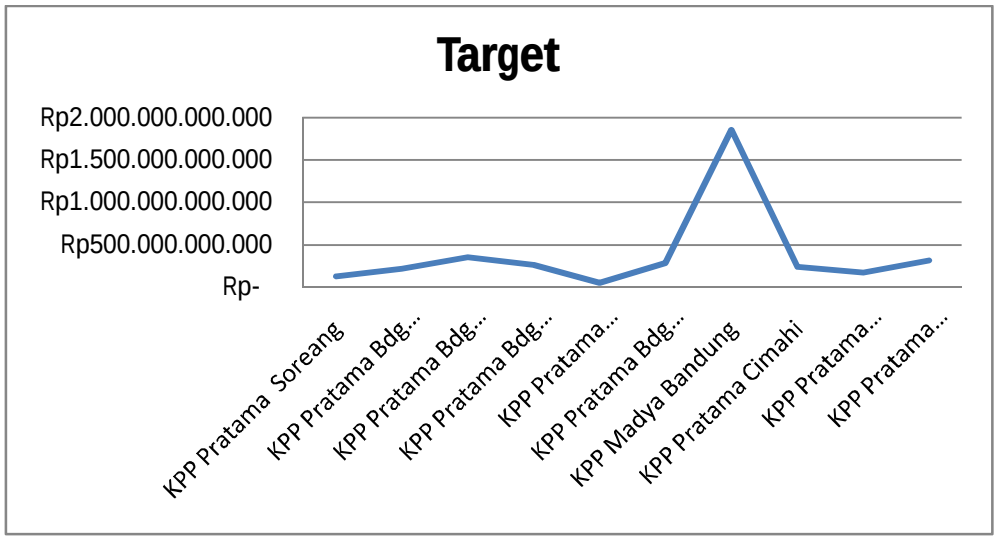
Penerimaan merupakan suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan ataupun suatu realisasi dari target yang telah ditentukan. Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu penambahan nilai barang dan jasa dengan dipakainya faktor-faktor produksi produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para konsumen. Berikut gambaran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Tabel 4.13
Penerimaan PPN

No	Nama	Target		Realisasi	
1	KPP Pratama Soreang	Rp	127,567,422,235	Rp	148,922,454,345
2	KPP Pratama Bdg Bojonagara	Rp	216,813,686,875	Rp	148,627,878,006
3	KPP Pratama Bdg Cicadas	Rp	352,363,397,140	Rp	350,205,092,558
4	KPP Pratama Bdg Karees	Rp	256,315,898,570	Rp	286,614,549,409
5	KPP Pratama Sumedang	Rp	48,223,890,525	Rp	45,551,447,835
6	KPP Pratama Bdg Cibeunying	Rp	285,214,707,301	Rp	281,138,188,335
7	KPP Madya Bandung	Rp	1,855,918,976,721	Rp	1,594,887,419,217
8	KPP Pratama Cimahi	Rp	239,207,662,689	Rp	449,252,686,186
9	KPP Pratama Majalaya	Rp	171,853,995,584	Rp	182,460,740,168
10	KPP Pratama Tegalega	Rp	311,873,941,572	Rp	185,556,932,501
Nilai Maksimum		Rp	1,855,918,976,721	Rp	1,594,887,419,217
Nilai Minimum		Rp	48,223,890,525	Rp	45,551,447,835
Rata-rata		Rp	386,535,357,921	Rp	367,321,738,856

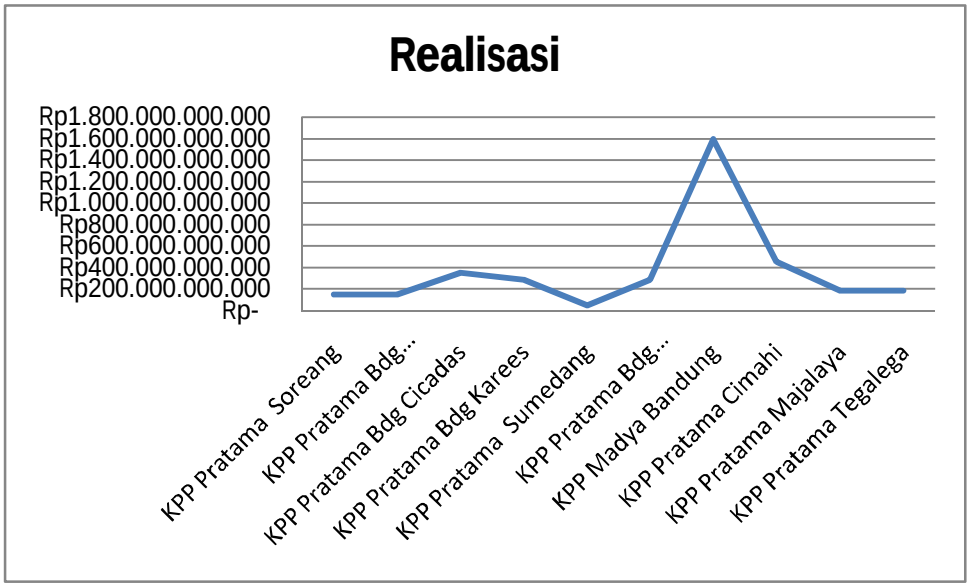
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan PPN tertinggi terdapat pada KPP Madya Bandung dengan target sebesar Rp

1,855,918,976,721, sedangkan target terkecil terdapat pada KPP Pratama Sumedang dengan target sebesar Rp 48,223,890,525. Dengan nilai rata-rata target sebesar Rp 386,535,357,921. Hasil tersebut dapat divisualisasikan pada gambar dibawah ini :



Grafik 4.1
Target penerimaan pajak

Untuk realisasi Penerimaan PPN tertinggi terdapat pada KPP Madya Bandung sebesar Rp 1,594,887,419,217. Sedangkan realisasi terendah terdapat pada KPP Pratama Sumedang sebesar Rp 45,551,447,835. Dengan nilai rata-rata realisasi sebesar Rp 367,321,738,856. Hasil tersebut dapat divisualisasikan pada gambar dibawah ini :



Grafik 4.2
Realisasi Penerimaan Pajak

4.4 Analisis Verifikatif

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan dan hipotesis yang dikemukakan, maka untuk mengetahui pengaruh Penggelapan Pajak dan Penghindaran Pajak terjhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bandung Cibeunying digunakan analisis Regresi Linier Berganda. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.

4.4.1 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regresi linier berganda), uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

a. Hasil Pengujian Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Jika data tidak mengikuti pola sebaran distribusi normal, maka akan diperoleh taksiran yang bias. Pengujian normalitas dilakukan melalui tes Kolmogorov-Smirnov koreksi Lilliefors. Dengan bantuan *software SPSS 13* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.14
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			10
Normal Parameters	a,b	Mean	-.0003113
		Std. Deviation	2.3771E+011
Most Extreme Differences		Absolute	.177
		Positive	.094
		Negative	-.177
Kolmogorov-Smirnov Z			.558
Asymp. Sig. (2-tailed)			.914

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Analisis kenormalan berdasarkan metode Kolmogorov-Smirnov mensyaratkan kurva normal apabila nilai Asymp. Sig. berada di atas batas maximum error, yaitu 0,05. Adapun dalam analisis regresi, yang diuji kenormalan adalah residual atau variabel gangguan yang bersifat stokastik acak, maka data di atas dapat digunakan karena variable residu berdistribusi normal.

b. Hasil Pengujian multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan sesuatu dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi tinggi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF). Dengan bantuan *software SPSS 13* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.15
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tax Evarian	.968	1.033
	Tax Avidance	.968	1.033

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Dari output di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam data.

c. Hasil Pengujian autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan angka Durbin-Watson hitung (DW) dengan nilai kritisnya (dL dan dU).

Kriteria pengambilan kesimpulan :

• Jika DW < dL atau DW > 4 – dL, maka terdapat autokorelasi.

• Jika dU < DW < 4 – dU, maka tidak terdapat autokorelasi.

• Jika dL ≤ DW ≤ dU atau 4 – dU ≤ DW ≤ 4 – dL, uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive).

Dengan ukuran sample n =10, α = 0,05 dan banyaknya variabel independen k = 2, didapat nilai kritis dL = 0.697 dan dU =1.641.

Hasil pengujian autokorelasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	Durbin-Watson
1	1.824

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.824. Karena nilai DW berada di antara dU (1.641) < DW (1.824) < 4 – dU (2.359), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

d. Hasil Pengujian heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap variable bebas dengan nilai mutlak residualnya menggunakan korelasi Rank Spearman. Dengan bantuan *software SPSS 13* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.17
Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			ABS_RES
Spearman's rho	Tax Evarian	Correlation Coefficient	.043
		Sig. (2-tailed)	.905
		N	10
	Tax Avidance	Correlation Coefficient	.629
		Sig. (2-tailed)	.051
		N	10

Dari output di atas dapat dilihat bahwa terdapat korelasi yang tidak signifikan. Hal ini dilihat dari nilai p-value (Sig) yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.4.1.1 Analisis Regresi berganda

Untuk melihat pengaruh Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (X_1) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2) Terhadap Penerimaan PPN (Y) digunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2}$$

Dimana :

Y = Penerimaan PPN

X_1 = Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

X_2= Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*)

a= Konstanta

b_1, b_2 =Koefisien Regresi

Hasil pengolahan *software SPSS 13* untuk analisis regresi berganda disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2E+012	7E+011		2.091	.075
	Tax Evarian	-1E+011	4E+010	-.509	-2.486	.042
	Tax Avidance	1E+011	3E+010	.774	3.782	.007

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 2E+012 - 1E+011\ X_1 + 1E+011\ X_2}$$

Nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

Dari persamaan regresi linier berganda diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 2E+012. Artinya, jika variabel Penerimaan PPN (Y) tidak dipengaruhi oleh kedua variabel bebasnya yaitu Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (X_1) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2) bernilai nol, maka besarnya rata-rata Penerimaan PPN akan bernilai 2E+012.

Tanda koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan Penerimaan PPN. Koefisien regresi untuk variabel bebas X_1 bernilai negatif, menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)(X_1) dengan Penerimaan PPN (Y).

Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 1E+011mengandung arti untuk setiap pertambahan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (X_1) sebesar satu satuan akan menyebabkan menurunnya Penerimaan PPN (Y) sebesar 1E+011.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_2 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2) dengan Penerimaan PPN (Y). Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 1E+011 mengandung arti untuk setiap pertambahan Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Penerimaan PPN (Y) sebesar 1E+011.

4.4.1.2 Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (Penggelapan Pajak dan Penghindaran Pajak) dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Melalui korelasi parsial akan dicari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ketika variabel independen lainnya konstan.

Tabel 4.19
Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,000 – 0,199	Sangat Lemah
2	0,200 – 0,399	Lemah
3	0,400 – 0,599	Cukup Kuat
4	0,600 – 0,799	Kuat
5	0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2009:183)

4.4.2 Pengaruh Penggelapan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I secara Parsial.

Koefisien korelasi antara Penggelapan Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat dari Hasil perhitungan dengan perhitungan PASW 13 for windows sebagai berikut:

Tabel 4.20
Koefisien Korelasi Parsial Penggelapan Pajak dengan penerimaan PPN

Variabel	Standardized Coefficients Beta	Correlations Zero-order	Besarnya Pengaruh Secara Parsial	Besarnya Pengaruh Secara Parsial (%)
X_1	-0.509	-0.370	0.188	18.8

Hubungan antara Penggelapan Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar –0,370 dengan arah negatif. Artinya hubungan antara Penggelapan Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai lemah. Ini menggambarkan bahwa ketika Penggelapan Pajak semakin banyak maka akan menurunkan penerimaan PPN pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I. Kemudian besar pengaruh Penggelapan Pajak dengan penerimaan PPN pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I ketika karakteristik individu tidak berubah adalah sebesar 18,8 %.

4.4.3 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I secara Parsial.

Koefisien korelasi antara Penghindaran Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat dari Hasil perhitungan dengan perhitungan PASW 13 for windows sebagai berikut:

Tabel 4.21
Koefisien Korelasi Parsial Penghindaran Pajak dengan penerimaan PPN

Variabel	Standardized Coefficients Beta	Correlations Zero-order	Besarnya Pengaruh Secara Parsial	Besarnya Pengaruh Secara Parsial (%)
X_2	0.774	0.683	0.529	52.9

Hubungan antara Penghindaran Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0,683 dengan arah positif. Artinya hubungan antara Penghindaran Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai lemah. Ini menggambarkan bahwa ketika Penggelapan Pajak semakin banyak maka akan menurunkan penerimaan PPN pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I. Kemudian besar pengaruh Penghindaran Pajak dengan penerimaan PPN pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I ketika karakteristik individu tidak berubah adalah sebesar 52,9 %.

4.4.4 Pengaruh Penggelapan Pajak dan Penghindaran pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I secara Simultan.

Adapun perhitungan secara simultan sebagai berikut :

1. Koefisien Korelasi berganda Penggelapan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama antara Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (X_1) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (X_2) terhadap Penerimaan PPN (Y), digunakan analisis korelasi berganda (R).

Tabel 4.22
Analisis Korelasi Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846[a]	.717	.636	2.695E+011

a. Predictors: (Constant), Tax Avidance, Tax Evarian

Berdasarkan hasil output *software SPSS* di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.846. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (X_1) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (X_2) terhadap Penerimaan PPN (Y).

2. Koefisien determinasi

Besarnya pengaruh Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Penerimaan PPN dapat ditunjukkan oleh koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut :

KD $= R^2 \times 100\%$

$= (0.846)^2 \times 100\%$

$= 71.7\ \%$

Artinya, variabel Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) memberikan pengaruh sebesar 71.7% terhadap Penerimaan PPN. Sedangkan sisanya sebesar 28.3% Penerimaan PPN dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

3. Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk menguji apakah pengaruh Penggelapan Pajak dan penghindaran Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai signifikan, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial (individual), dilakukan uji signifikansi. Pengujian dimulai dari pengujian simultan, dan apabila hasil pengujian simultan signifikan dilanjutkan dengan uji parsial.

a. Pengujian hipotesis secara Simultan

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji F.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari Penggelapan Pajak (*Tax Evarian*) (X_1) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2), terhadap Penerimaan PPN(Y).

Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari Penggelapan Pajak (*Tax Evarian*) (X_1) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2) terhadap Penerimaan PPN(Y).

$\alpha = 5\%$

Statistik Uji:

$$F = \frac{R^2(n-k-1)}{k(1-R^2)}$$

Kriteria Uji : 1. Terima Ho jika F hitung < F tabel

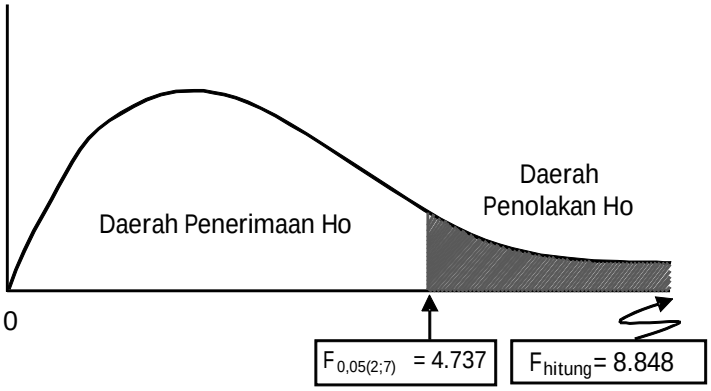
2. Tolak Ho jika F hitung ≥ F tabel

F tabel = $F_{\alpha\,;\,(df1,\,df2)}$; df1 = k , df2 = n-k-1

Hasil uji F berdasarkan pengolahan SPSS disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.23
Pengujian Hipotesis Secara Overall (Uji F)

F hitung	df	F tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
8.848	df1 = 2 df2 = 7	4.737	0.012	Ho ditolak	Ada pengaruh (Signifikan)



Gambar 4.11
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan Penggelapan Pajak (*Tax Evarian*) (X_1) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2), terhadap Penerimaan PPN(Y)

Dari tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 8.848. Karena nilai F hitung (8.848) > F tabel (4.737), maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari Penggelapan Pajak (*Tax Evarian*) (X_1) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2) terhadap Penerimaan PPN (Y) pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I.

b. Pengujian hipotesis secara Parsial

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial dilakukan pengujian koefisien regresi dengan menggunakan statistik Uji t. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/ penolakan H0) dapat dilakukan dengan

membandingkan thitung dengan ttabel atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya.

$\alpha = 5\%$

Statistik Uji :

$t_{hit} = \frac{b}{Se(b)}$, derajat bebas = n-k-1

Kriteria Uji : 1. Terima Ho jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel

2. Tolak Ho jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel

Hasil uji t berdasarkan pengolahan SPSS disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.24
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	df	t tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
X1	-2.486	7	2.365	0.042	Ho ditolak	Signifikan
X2	3.782			0.007	Ho ditolak	Signifikan

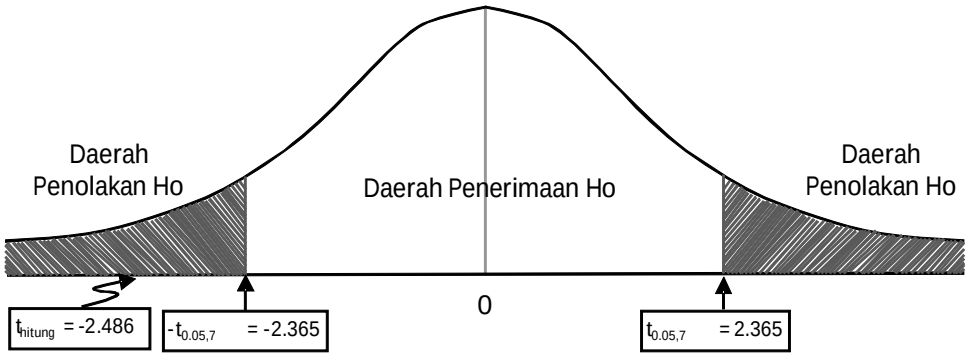
1) Pengaruh Penggelapan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara parsial atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji t.

Hipotesis :

- $Ho_1 : \beta_1 = 0$ Penggelapan Pajak (*Tax Evarian*) (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN (Y).

  $Ha_1 : \beta_1 \neq 0$ Penggelapan Pajak (*Tax Evarian*) (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN (Y).



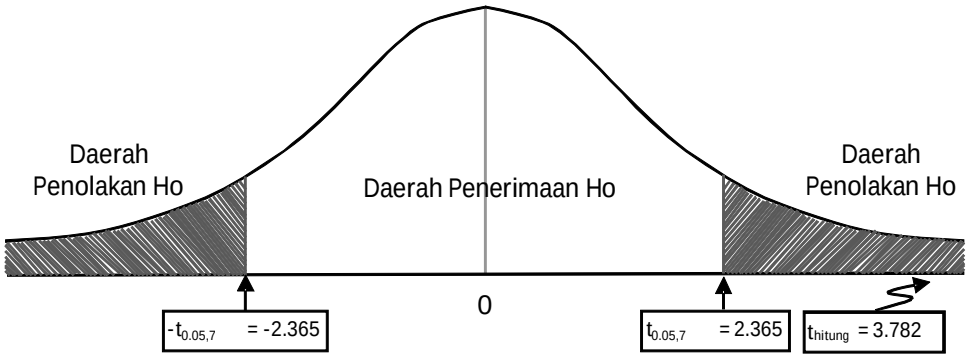
Gambar 4.12
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Penggelapan Pajak (*Tax Evarian*) (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN (Y)

Variabel X_1 memiliki nilai -t hitung lebih kecil dari nilai -t tabel. Karena nilai -t hitung (-2.486) < -t tabel (-2.365), maka Ho ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Penggelapan Pajak (*Tax Evarian*) (X_1) terhadap Penerimaan PPN (Y).

2) Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

- $Ho_2 : \beta_2 = 0$ Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN (Y).

  $Ha_2 : \beta_2 \neq 0$ Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN (Y).



Gambar 4.13
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN (Y)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

Variabel X_2 memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Karena nilai t hitung (3.782) > t tabel (2.365), maka Ho ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Penghindaran Pajak (*Tax Avidance*) (X_2) terhadap Penerimaan PPN (Y).

4.4.5 Pembahasan

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil penelitian tentang pengaruh Penggelapan pajak dan Penghindaran Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I. Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data hasil penelitian adalah analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Pada analisis deskriptif digunakan persentase jumlah skor jawaban untuk merepresentasikan tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Pada pengujian hipotesis digunakan analisis regressi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, dan regresi yang digunakan adalah regressi linier berganda. Karena hasil skoring jawaban responden pada semua variabel masih merupakan data ordinal maka agar

data dapat diolah menggunakan analisis regresi terlebih dahulu dikonversi menjadi skala interval menggunakan *Method Of Succesive Interval*.

4.4.5.1 Analisis Deskriptif Penggelapan Pajak

Dari hasil pengujian perumusan masalah deskriptif diketahui bahwa penggelapan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung menurut respon responden termasuk dalam kategori tidak baik, dimana wajib pajak badan secara umum melakukan hal-hal yang mendukung penggelapan pajak. Apabila dilihat dari indikator nampak bahwa semua indikator termasuk dalam kategori sangat tidak baik. Namun jika dilihat dari indikator berusaha menyuap fiskus dikategorikan baik, karena pada KPP di wilayah Bandung masih terdapat beberapa wajib pajak menyetujui memberikan hadiah kepada pegawai pajak.

4.4.5.2 Analisis Deskriptif Penghindaran Pajak

Dari hasil pengujian perumusan masalah deskriptif diketahui bahwa penghindaran pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung menurut respon responden termasuk dalam kategori sangat tidak baik, dimana wajib pajak badan secara umum melakukan hal-hal yang merupakan tindakan penghindaran pajak.

Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung sudah mencapai tingkat yang tinggi karena sebagian besar wajib pajak badan setuju dengan adanya pihak yang ingin meminimkan jumlah pajak bayar mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Defriandry Taslim, bahwa usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku.

4.4.5.3 Analisis Deskriptif penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari hasil perumusan masalah deskriptif diketahui bahwa target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama di wilayah Bandung penerimaan terbesar terdapat pada KPP Pratama Madya Bandung sebesar Rp 1,855,918,976,721, sedangkan target penerimaan terkecil terdapat pada KPP Pratama Sumedang Rp 48,223,890,525 dengan nilai rata-rata target sebesar Rp 386,535,357,921. Akan tetapi target tersebut tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Realisasi Penerimaan PPN tertinggi terdapat pada KPP Madya Bandung sebesar Rp 1,594,887,419,217. Sedangkan realisasi terendah terdapat pada KPP Pratama Sumedang sebesar Rp 45,551,447,835. Dengan nilai rata-rata realisasi sebesar Rp 367,321,738,856. Jadi, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada KPP Pratama di wilayah Bandung belum mencapai target dikarenakan target tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

4.4.5.4 Pengaruh Penggelapan Pajak dan Penghindaran pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara simultan dan parsial

1. Pengaruh Penggelapan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara parsial

Hubungan antara Penggelapan Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berada pada arah negatif. Artinya hubungan antara Penggelapan Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai lemah. Ini

menggambarkan bahwa ketika Penggelapan Pajak semakin naik, makan akan menurunkan penerimaan PPN pada KPP Prtama di wilayah Bandung.

Melalui data yang terkumpul dilapangan, terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Penggelapan Pajak dengan penerimaan PPN pada KPP Pratama yang ada di wilayah Bandung. Melalui uji t diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan Penggelapan Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama yang ada di wilayah Bandung. Artinya dengan tingkat kepercayaan 18,8% disimpulkan bahwa Penggelapan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama yang ada di wilayah Bandung.

Jadi besar atau kecilnya penerimaan PPN pada penelitian ini salah satunya disebabkan oleh kurang patuhnya wajib pajak badan yang mengumpulkan SPT Masa dan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan usahany. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai dari korelasi diatas menunjukkan bahwa terbukti teori yang disampaikan oleh Kin and Smith tentang penggelapan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

" over the last few years, there has been a marked increase in concern with lossess of VAT Revenue through evasion and fraud ." (2006)

2. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara parsial

Hubungan antara Penghindaran Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berada pada arah positif. Artinya hubungan antara Penghindaran Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai lemah. Ini

menggambarkan bahwa ketika Penghindaran Pajak semakin naik, makan akan menurunkan penerimaan PPN pada KPP Prtama di wilayah Bandung.

Melalui data yang terkumpul dilapangan, terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Penghindaran Pajak dengan penerimaan PPN pada KPP Pratama yang ada di wilayah Bandung. Melalui uji t diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan Penghindaran Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama yang ada di wilayah Bandung. Artinya dengan tingkat kepercayaan 52,9% disimpulkan bahwa Penggelapan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama yang ada di wilayah Bandung.

Jadi besar atau kecilnya penerimaan PPN pada penelitian ini salah satunya disebabkan oleh masih adanya wajib pajak yang melakukan penghindaran dengan pindah lokasi pada saat akan dilakukan pemeriksaan pajak. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai dari korelasi diatas menunjukkan bahwa terbukti teori yang disampaikan oleh Panos Pashardes dan Alexandros Polycarpou tentang penghindaran pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

” *the results show that using the corrected in place of the reported income, increases inequality and poverty because individuals with high income under-report their income more than those with low income. This suggests that egalitarian and antipoverty policies need to: (i) become more generous to compensate for the fact that measured inequality and poverty underestimate the true extent of these problems; and (ii) complement mean testing with*

indicators other than reported income to avoid false entitlement to social benefits by persons under-reporting their income" (2008)

3. Pengaruh Penggelapan Pajak dan Penghindaran Pajak terhaap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara simultan

Hubungan kedua variabel bebas (penggelapan pajak dan penghindaran pajak) secara simultan dengan penerimaan PPN menunjukkan kriteria cukup kuat. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel bebas (penggelapan pajak dan penghindaran pajak) memiliki hubungan yang cukup kuat dengan penerimaan PPN pada KPP Pratama di wilayah Bandung.

Sementara nilai R-Square (0.846), menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yang terdiri dari penggelapan pajak dan penghindaran pajak secara simultan mempunyai pengaruh yang memebuat penerimaan PPN meningkat atau menurun. Artinya secara bersama-sama variabel bebas (penggelapan pajak dan penghindaran pajak) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 71,7% terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama di wilayah Bandung. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati adalah sebesar 28,3%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel bebas yang diteliti.

Jadi besar kecilnya penerimaan PPN pada penelitian ini bukan hanya karena penggelapan pajak dan penghindaran pajak saja namun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti yang dikemukan oleh Keen dan Smith (2006) yaitu :

” over the last few years, there has been a marked increase in concern with lossess of VAT Revenue through evasion and fraud.”